

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN OBJEK  
WISATA PENDULANGAN INTAN PUMPUNG CEMPAKA**

**Gusti Nur Alisa Rizki Andini<sup>1</sup>, Lusia Astrika<sup>2</sup>**

**Email: [gustialisaandini@gmail.com](mailto:gustialisaandini@gmail.com)**

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedaro, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Objek Wisata Pendulungan Intan di Kawasan Pumpung, Banjarbaru, memiliki daya tarik sejarah dan budaya lokal. Namun, pengembangannya menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, lahan, dan fasilitas pendukung. Penelitian ini mengkaji pola kolaborasi antar pemangku kepentingan menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008). Hasil penelitian menunjukkan indikator kolaborasi seperti dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, ketidakseimbangan sumber daya terkait legalitas lahan, serta ketergantungan finansial Pokdarwis pada pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kepastian hukum penggunaan lahan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta kemandirian finansial Pokdarwis dan diperlukan optimalisasi peran swasta dalam pemasaran digital.

**Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Pariwisata, Pumpung.**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

## **ABSTRACT**

*The Diamond Panning tourism attraction in the Pumpung area, Banjarbaru, has historical and local cultural appeal. However, its development faces several challenges, including limited budget, land constraints, and inadequate supporting facilities. This study examines the patterns of collaboration among stakeholders using a qualitative approach and the Collaborative Governance framework proposed by Ansell and Gash (2008). The results show that collaboration indicators such as face-to-face dialogue, trust-building, commitment, and shared understanding have not functioned optimally. The main obstacles include low community awareness, resource imbalances related to land legality, and the financial dependence of Pokdarwis on the government. Therefore, it is necessary to strengthen legal certainty in land use, increase community participation, enhance the financial independence of Pokdarwis, and optimize the role of the private sector in digital marketing.*

**Keywords:** *Collaborative Governance, Tourism, Pumpung*

### **PENDAHULUAN**

Pariwisata merupakan sektor strategis yang mendorong percepatan pembangunan daerah melalui kontribusi sosial, budaya, dan ekonomi. Pascapandemi, sektor ini menunjukkan tren pemulihan signifikan dengan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai 4,0% pada tahun 2024 (Kementerian Pariwisata et al., 2025).

Pada tingkat daerah, Kota Banjarbaru menjadi salah satu pilar pariwisata Kalimantan Selatan

dengan kunjungan mencapai 1,79 juta wisatawan pada tahun 2024. Melalui kebijakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2023, maka ditetapkan pula Pendulangan Intan Pumpung Cempaka sebagai destinasi pariwisata khusus. Kawasan ini memiliki keunikan karena memadukan warisan geologi dan tradisi penambangan tradisional masyarakat Banjar (Media Geopark Meratus, 2023).

Namun, kompleksitas pengelolaan aset publik yang

melibatkan warisan budaya dan geologi ini memerlukan model tata kelola yang inklusif. Secara teoritik, *collaborative governance* hadir sebagai paradigma yang melibatkan lembaga pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam forum pengambilan keputusan bersama untuk mencapai kesepakatan (Ansell & Gash, 2008). Pendekatan ini menjadi krusial mengingat tantangan pariwisata berkelanjutan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah secara tunggal (Nasution, 2023).

Studi terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi pariwisata sering kali terhambat. Fathahillah dan Cadith (2022) mencatat dominasi pemerintah yang masih kuat dalam pengembangan Geopark, sementara Andriyanto (2024) menemukan kendala pada aspek regulasi formal dan keterbatasan SDM. Lebih lanjut, Wahyuni (2025) serta Seviai dan Zulkarnaini (2025) menekankan bahwa komunikasi yang tidak terstruktur dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi titik lemah utama. Berbeda dengan temuan-temuan tersebut, fenomena di

Pumpung Cempaka menemukan bahwa meskipun forum dialog dan pertemuan tatap muka antar pemangku kepentingan telah berjalan rutin, namun hal ini belum berbanding lurus dengan kemajuan infrastruktur, kemandirian finansial pengelola, maupun penyelesaian isu legalitas lahan milik masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan forum dialog tidak secara otomatis menjamin efektivitas kolaborasi jika terdapat hambatan struktural dalam proses pengelolaan.

Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai dinamika kolaborasi pada lokasi penelitian yang secara prosedural aktif berdialog namun secara fungsional mengalami stagnasi. Dengan menggunakan model Ansell dan Gash (2008), penelitian ini membedah proses kolaborasi melalui dimensi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil sementara dengan faktor-faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi melalui analisis kondisi

awal, kepemimpinan fasilitatif, dan desain kelembagaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika proses *collaborative governance* dalam pengembangan Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi interaksi antar pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi tata kelola pariwisata budaya serta rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pokdarwis dalam memperkuat sinergitas pengelolaan yang berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengembangan Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka di Kawasan Pumpung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Subjek penelitian dipilih berdasarkan

informan yang dianggap memahami permasalahan penelitian yaitu Lurah Sungai Tiung, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru, Koordinator Bidang Perencanaan Program dan Evaluasi Badan Pengelola Kawasan Geopark Meratus Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua dan anggota Pokdarwis Pumpung Trisakti, serta masyarakat sekitar.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara serta dokumentasi yang berkaitan dengan pengembangan objek wisata. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk memahami proses *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dinamika Proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan**

## **Objek Wisata Pendulungan Intan Pumpung Cempaka**

### **1. Dialog Tatap Muka**

Tata kelola kolaboratif mendesak adanya komunikasi aktif dan interaksi dua arah antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2009, penyelenggaraan pariwisata harus didasari prinsip partisipasi dan integrasi lintas aktor. Namun, dialog tatap muka di Pumpung Cempaka belum mencapai potensi maksimal karena cenderung bersifat administratif dan prosedural melalui agenda resmi.

Meskipun Pokdarwis melakukan pertemuan mandiri, praktik tersebut belum sepenuhnya inklusif karena informasi sering terhenti pada tingkat pengelola dan tidak tersebar merata ke masyarakat. Pola satu arah ini menyebabkan aspirasi masyarakat bawah kurang terwujud. Secara teori, dialog memerlukan pengaruh timbal balik dan kesetaraan, bukan hanya keterlibatan elit pengelola. Karena dialog tatap muka bukan hanya sekadar negosiasi tetapi

mengidentifikasi dan meraih tujuan bersama (Akbar dkk., 2022). Oleh karena itu, dialog tatap muka merupakan langkah vital dan dasar penting dalam membangun kepercayaan untuk mencapai tata kelola yang sukses.

### **2. Membangun Kepercayaan**

Proses membangun kepercayaan dalam pengembangan Objek Wisata Pendulungan Intan berasal dari dialog berkesinambungan antara pemerintah dan Pokdarwis. Upaya Badan Pengelola Geopark Meratus melibatkan masyarakat dalam aktivitas penting dan forum resmi dipandang sebagai langkah mengokohkan legitimasi pemerintah. Namun, pembentukan kepercayaan menunjukkan kondisi asimetris. Rasa percaya telah terbangun di tingkat pengelola, tetapi kepercayaan pemilikan lahan masih lemah, terlihat dari sikap "menunda" terkait kepastian penggunaan lahan.

Kepercayaan bukanlah masalah administratif, melainkan proses bertahap yang memerlukan pembuktian komitmen secara nyata (Huxham dan Vangen, 2005; Ring

dan Van de Ven, 1994 dalam Nasution, 2023). Dalam penelitian ini, membangun kepercayaan masih rentan karena adanya krisis kepercayaan di masyarakat. Konsistensi komunikasi dan pembuktian manfaat ekonomi sangat diperlukan agar keraguan berkurang demi tercapainya tahap kolaborasi yang stabil dan berkelanjutan.

### **3. Komitmen terhadap Proses**

Komitmen dalam pengembangan pariwisata ini dipahami bukan sekadar kesepakatan formal, melainkan ikatan konsisten untuk melaksanakan tindakan nyata secara berkelanjutan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa komitmen para aktor masih tertahan pada aspek formalitas administratif. Meski telah diperkuat oleh MoU, pembinaan rutin, dan pembentukan Pokdarwis, komitmen ini belum mendalam karena kualitas dialog masih bersifat satu arah dan kepercayaan masyarakat belum seimbang. Akibatnya, keterlibatan pemangku kepentingan lebih didasari kepatuhan prosedur resmi daripada kesadaran kolektif yang terlihat dari

keraguan dalam memutuskan pemanfaatan lahan warga sehingga belum mampu membangun sistem layanan pariwisata yang operasional.

Menurut Setyaningtyas dkk. (2024), keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh kesediaan aktor untuk terus terlibat secara substansial. Oleh karena itu, diperlukan transformasi dari sekadar menjalankan prosedur menjadi tanggung jawab bersama yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat melampaui batas administratif elit.

### **4. Pemahaman Bersama**

Pemahaman bersama dalam pengembangan Objek Wisata Pendulangan Intan telah terbentuk di tingkat aktor kunci, terutama antara Pemerintah dan Pokdarwis. Keduanya menunjukkan keselarasan visi terkait pariwisata berkelanjutan berbasis nilai-nilai Geopark yang mencerminkan bahwa kolaborasi manajerial telah memasuki tahap konsolidasi tujuan. Dalam tata kelola kolaboratif, pemahaman ini merupakan hasil interaksi berulang untuk menyepakati misi dan

menyerap nilai kolektif. Namun, penelitian menemukan adanya ketidakcocokan karena pemahaman tersebut belum menyebar merata hingga ke masyarakat sekitar Pumpung.

Kesenjangan kesadaran ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran kolaboratif belum dijalankan secara menyeluruh, sehingga visi pengembangan pariwisata belum diadopsi oleh semua pihak. Hal ini terjadi akibat terbatasnya kesempatan partisipasi dan saluran komunikasi yang inklusif bagi warga lokal.

Secara teoritis, pemahaman bersama dalam *Collaborative Governance* seringkali berkembang lebih dulu di kalangan aktor atas sebelum menyentuh akar rumput. Oleh karena itu, keberlanjutan kerja sama di Pumpung Cempaka sangat bergantung pada strategi komunikasi yang lebih luas untuk membangun legitimasi sosial yang kuat. Penyeragaman visi dan harapan secara merata menjadi syarat mutlak agar pemahaman bersama melampaui sekadar kesepakatan formal.

## 5. Hasil Sementara

Dinamika kolaboratif saat ini telah menghasilkan perubahan nyata berupa penyediaan infrastruktur pendukung yang tertata dan penguatan edukasi berbasis Geopark Meratus. Pencapaian ini mencerminkan *output* fisik dan legalitas yang sebelumnya sulit dicapai secara mandiri. Meskipun demikian, efektivitas kolaborasi belum mencapai kematangan menyeluruh karena peta jalan pengembangan masih terfokus pada perencanaan infrastruktur dasar.

Dalam kajian pemerintahan kolaboratif, pencapaian awal ini dianggap sebagai kemenangan kecil (*small wins*) yang menghubungkan tahap awal menuju tahap stabil. Keberadaan hasil nyata berfungsi sebagai umpan balik positif untuk memperkuat kepercayaan dan komitmen antaraktor guna mempercepat kerja sama. Namun, dominasi hasil yang masih berada dalam fase transisi menunjukkan bahwa kolaborasi belum optimal menghasilkan keuntungan ekonomi langsung bagi masyarakat.

Keberhasilan di Pumpung Cempaka tidak hanya dinilai hanya dari hasil akhir, melainkan sebagai proses perlahan di mana hasil sementara menjadi pondasi. Keberlanjutan kolaborasi kini sangat tergantung pada kualitas perencanaan strategis dan efektivitas koordinasi aktor untuk mempercepat program kesejahteraan ekonomi lokal.

## **Faktor Pendorong dan Pendukung Proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Objek Wisata Pendulungan Intan Pumpung Cempaka**

### **1. Kondisi Awal**

Analisis kondisi awal mencakup tiga dimensi krusial yang menentukan arah kolaborasi di Objek Wisata Pendulungan Intan Pumpung Cempaka. **Pertama**, terjadi ketidakseimbangan sumber daya yang signifikan. Dari aspek manusia, komitmen masyarakat masih terbatas pada hasil instan. Secara teknis, terdapat stagnasi akibat ketidakpastian legalitas lahan, serta secara finansial Pokdarwis masih sangat bergantung pada anggaran pemerintah. Ketidakseimbangan ini

menjadi penghalang bagi Pokdarwis dalam menyuarakan kepentingan dan menghambat terciptanya kolaborasi yang sinergis secara menyeluruh.

**Kedua**, insentif untuk berkolaborasi sangat dipengaruhi oleh harapan masyarakat terhadap keuntungan finansial langsung. Rendahnya pendapatan mandiri dari ekonomi lokal menjadi penghambat utama, di mana lemahnya dampak ekonomi nyata berisiko menurunkan dorongan partisipasi jangka panjang para pelaku. **Ketiga**, sejarah kerja sama menunjukkan hubungan yang harmonis dan positif tanpa jejak konflik antara pemerintah dan Pokdarwis. Hubungan ini merupakan modal sosial penting dalam membangun kepercayaan. Namun, situasi rendahnya konflik tersebut belum menjamin efektivitas kolaborasi jika tidak dibarengi peningkatan kapasitas aktor lokal. Secara keseluruhan, kondisi awal menunjukkan relasi yang kondusif namun rentan secara struktural akibat ketidakmerataan sumber daya dan kurangnya insentif ekonomi.

### **2. Kepemimpinan Fasilitatif**



Kepemimpinan fasilitatif telah berkembang melalui peran aktif Ketua Pokdarwis sebagai jembatan aspirasi masyarakat lokal dengan kebijakan pemerintah. Namun, terdapat ketidakselarasan di tingkat manajerial antara koordinasi normatif dan tindakan nyata, serta ketiadaan mekanisme regenerasi yang mengancam pemberdayaan jangka panjang.

Dalam kerangka kolaboratif, kepemimpinan adalah kemampuan menjaga proses tetap terbuka dan adil, bukan dominasi kekuasaan. Meski Ketua Pokdarwis efektif mengelola pemangku kepentingan, fungsi fasilitatif belum merata akibat kurangnya integrasi vertikal dan ketergantungan pada individu tertentu. Pada sisi lain, kepemimpinan sektor pemerintah melalui Badan Pengelola Geopark Meratus menunjukkan kinerja baik dalam mengatur keterlibatan lintas sektor. Secara keseluruhan, kepemimpinan telah memiliki dasar kokoh namun memerlukan penguatan pada aspek keberlanjutan regenerasi guna menjamin kelangsungan kolaborasi masa depan.

### **3. Desain Kelembagaan**

Desain kelembagaan mencakup aturan dan regulasi yang menyusun kolaborasi guna mencapai legitimasi prosedural. Di Objek Wisata Pumpung Cempaka, pengembangan menggunakan kombinasi mekanisme formal dan informal. Pola informal memberikan fleksibilitas komunikasi melalui perangkat seluler, sementara struktur formal terlihat pada Nota Kesepahaman (MoU) antara Pokdarwis dan Badan Pengelola Geopark Meratus sebagai panduan strategis yang kuat. Sebaliknya, hubungan dengan Disporabudpar Kota Banjarbaru cenderung bersifat koordinasi fungsional tanpa rincian tugas tertulis, sehingga akuntabilitas peran belum kokoh dan berisiko menimbulkan ketidakpastian operasional.

Perbedaan tingkat formalitas ini menunjukkan rancangan kelembagaan yang belum konsisten. Selain itu, ketiadaan sektor swasta mengindikasikan desain yang masih eksklusif, menyebabkan ketergantungan tinggi pada anggaran

publik dan menghambat diversifikasi ekonomi lokal. Meskipun kekhawatiran terhadap komersialisasi merupakan bentuk perlindungan aset publik, absennya mitra swasta justru menghalangi kemajuan destinasi. Secara teori, kelembagaan seharusnya mengatur kontribusi swasta agar selaras dengan pelestarian sosial-budaya. Oleh karena itu, diperlukan redefinisi desain kelembagaan yang lebih inklusif dan transparan untuk menjamin legitimasi prosedural serta keberlanjutan pengembangan objek wisata secara menyeluruh.

## **KESIMPULAN**

*Collaborative Governance* dalam pengembangan Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka belum optimal. Berdasarkan kerangka Ansell dan Gash (2008), dialog tatap muka masih bersifat satu arah dan belum menyentuh persoalan akar rumput, sehingga menciptakan ketidakseimbangan kepercayaan antara aktor internal dan masyarakat luas. Akibatnya, komitmen kolaborasi masih terbatas pada kepatuhan administratif dan visi

bersama belum dipahami secara merata. Hal ini menyebabkan hasil sementara periode 2021–2025 baru sebatas penyediaan sarana fisik dasar tanpa dampak ekonomi langsung bagi warga lokal.

Faktor pendorong utama adalah kepemimpinan fasilitatif dan modal sosial yang harmonis. Namun, kolaborasi terhambat oleh asimetri sumber daya, terutama ketidakjelasan status lahan dan ketergantungan finansial pada pemerintah. Keberhasilan pengembangan destinasi sangat bergantung pada kemampuan aktor untuk beranjak dari formalitas di atas kertas menuju tindakan kolektif yang nyata. Tanpa penguatan kepercayaan dan perbaikan kualitas dialog di tingkat bawah, kolaborasi ini berisiko tetap menjadi proses administratif tanpa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merumuskan beberapa saran strategis untuk mengoptimalkan tata kelola kolaboratif di Objek Wisata Pendulangan Intan Pumpung Cempaka. Pertama, pemerintah perlu

mempercepat kepastian hukum melalui aturan penggunaan lahan guna menjamin kelancaran pembangunan infrastruktur fisik.

Kedua, sosialisasi visi kerja sama harus dilakukan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat agar mereka merasa memiliki peran penting sebagai aktor pendorong. Ketiga, kemandirian finansial Pokdarwis perlu ditingkatkan melalui pengembangan usaha kreatif, seperti kuliner dan suvenir khas, guna mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah.

Terakhir, peran sektor swasta perlu diintegrasikan sebagai mitra biro perjalanan wisata dalam pemasaran dan promosi digital. Pola kerja sama ini dirancang tanpa memberikan hak penguasaan lahan, sehingga jangkauan pasar meluas namun keaslian serta integritas kawasan tetap terjaga.

#### DAFTAR PUSTAKA

Akbar, R., Supriyono, B., & Domai, T. (2022). *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten

Malang. *Jurnal Ilmiah Adminitrasi Publik*, 8(2), 170-177. <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap>

Andriyanto, G, A. (2024). *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya Di Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon. *BELEID: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, 2(2), 138-154. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/beleidjalpp/index>

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Reseach and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Fathahillah, M, M., & Cadith, J. (2022). Model Kolaborasi Pengembangan Geopark Bayah Dome. *Jurnal Adminitrasi Negara*, 10(1),

- 80-96. [http:// DOI  
10.30656/sawala.v10i1.4394](http://doi.org/10.30656/sawala.v10i1.4394)
- Hardani et. al. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Jumriani, J., Rochgiyanti, R., & Kanukisya, B. (2023). Dinamika Sosial-Ekonomi: Pertambangan Tradisional dan Ketahanan Masyarakat di Kalimantan Selatan. *Society*, 11(2), 531-544. [10.33019/society.v11i2.634](https://doi.org/10.33019/society.v11i2.634)
- Kementerian Pariwisata, Bank Indonesia, dan Kementerian Bappenas. (2025). *Indonesia Tourism Outlook 2025/2026* (Vol. 1). Jakarta: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
- Maulia, E. I., & Setyono, B. *Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Analisis Dampak Digitalisasi Desa Wisata*. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 404-418. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/42391>
- Nasution, S. M. (2023). *Collaborative Governance dalam Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Noor, M., Suedi, F., Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: Bildung.
- Sari, Y. P. (2019). Nilai Budaya dalam Leksikon Pendulangan Intan Pada Masyarakat Banjar: Kajian Etnolinguistik. *UNDAS Jurnal Hasil Penelitian Bahasa dan Sastra*, 15(2), 161-174. <https://doi.org/10.26499/und.v15i2.1701>
- Setyaningtyas, G., Maesaroh, Widowati, N. (2024). *Collaborative Governance dalam Pengembangan Wisata di Kabupaten Grobogan*. *Journal of Public Policy and*

*Management Review*, 1(1),  
762-775.  
[https://doi.org/10.14710/jppm  
r.v1i1.49562](https://doi.org/10.14710/jppm.r.v1i1.49562)

Sevial, V, P., & Zulkarnaini. (2025).  
*Collaborative Governance*  
dalam Pengembangan  
Ekowisata Mangrove di Desa  
Pangkalan Jambi Kecamatan  
Bukit Batu Kabupaten  
Bengkalis. *Jurnal Niara*, 18  
(1), 172-180.  
[https://doi.org/10.31849/niara  
.v18i1.27386](https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.27386)

Situs Penambangan Tradisional Intan  
Cempaka. (2023). Dalam  
[https://meratusgeopark.org/sit  
us-penambangan-tradisional-  
intan-cempaka/](https://meratusgeopark.org/situs-penambangan-tradisional-intan-cempaka/). Diunduh  
pada 10 Oktober.

Wahyuni, S. (2025). *Collaborative  
Governance* dalam  
Pengembangan Desa Wisata  
Rantau Langsat Di Kecamatan  
Batang Gansal Kabupaten  
Indragiri Hulu. *Inovasi  
Pembangunan: Jurnal  
Kelitbangan*, 13(1), 1-8.  
[https://doi.org/10.35450/jip.v  
13i01.991](https://doi.org/10.35450/jip.v13i01.991)